

**PENGARUH PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
TERHADAP KESEMPATAN KERJA PADA SEKTOR TRANSPORTASI LAUT
DI INDONESIA**

Kristian Cahyandi

andykrist94@gmail.com

Akademi Maritim Nusantara - Cilacap

ABSTRAK

Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak Januari 2016 seperti halnya ke sembilan negara anggota ASEAN. Pemerintah melakukan berbagai persiapan dan akan terus mencanangkan langkah-langkah agar Indonesia dapat berdiri sejajar dengan anggota ASEAN lainnya, termasuk kesiapan SDM sebagai salah satu pilar MEA. Bagaimanakah dengan kesiapan tenaga kerja pada sector transportasi laut ? Mengingat kebijakan pemerintah sendiri adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan salah satunya penerapan Tool laut. Seyogyanya tenaga kerja pada sector transportasi laut ikut juga mempersiapkan diri dari sisi pembekalan keterampilan berstandar internasional khususnya melalui *International Maritime Organization* (IMO). Kemampuan berbahasa asing, penerapan teknologi informasi, serta berwawasan global sudah menjadi suatu kemampuan wajib yang harus dimiliki. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah factor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja pada sector transportasi laut. Penelaahan dilakukan secara kualitatif deskriptif tentang fakta-fakta kegiatan yang tercatat dan terpublikasi. Dari hasil studi tersebut didapatkan bahwa perlu adanya dorongan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja pada sector transportasi laut terutama dalam hal penguasaan bahasa asing untuk menjadi salah satu profesi yang memiliki standar kompetensi di tingkat ASEAN. Keikutsertaan organisasi profesi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar yang diminta belum terlihat secara signifikan. Pendalaman terhadap kegiatan organisasi kepelautan di Indonesia menunjukkan bahwa mereka belum memprioritaskan kegiatannya pada persiapan diri menghadapi MEA.

Kata Kunci: MEA, standar kompetensi, IMO

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai hasil dari kesepakatan negara-negara di wilayah Asia Tenggara telah membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat Asia Tenggara dalam memperdagangkan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja tanpa adanya hambatan lagi. Indonesia sebagai salah satu negara anggota juga berpeluang ikut andil dalam pasar

tunggal tersebut. Dari segi komoditas dan ketersediaan barang, Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Akan tetapi, di sisi lain Indonesia masih memiliki kendala, khususnya pada sector permodalan dan keahlian tenaga kerja.

MEA menjadi ajang kompetisi dari sisi sumber daya manusia (SDM). Ini terjadi karena keterlibatan tenaga kerja terampil yang tak lagi hanya dari dalam negeri saja, banyak tenaga kerja terampil dari

negara lain di kawasan ASEAN juga sudah mulai mengisi ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan perlu terus digagas secara berkesinambungan.

Persatuan negara-negara Asia Tenggara atau yang dikenal dengan istilah *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 terdiri dari 5 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand dan berkedudukan di Jakarta. Asosiasi ini dibentuk dalam kerangka kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, pendidikan dan bidang-bidang lain selain juga untuk menciptakan keamanan dan kestabilan regional (Khomein, 1992).

Setelah lebih dari 50 tahun berkiprah, asosiasi ini berkembang cepat. Negara anggotanya menjadi 10 dengan masuknya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Cita-cita dari ASEAN menjadi kesatuan wilayah ekonomi sudah dirintis sejak 1977 dengan dibentuknya *ASEAN Preferential Trading Arrangement* dan dimulainya *ASEAN Free Trade Area* di tahun 1992 (Swajaya, 2014). Di bidang ekonomi, secara kolektif, di tahun 2014 ASEAN tercatat sebagai ke-3 terbesar di Asia dan ke-7 terbesar di dunia dengan pertumbuhan GDP per kapita meningkat 76% dibanding 2007. Penduduknya yang tercatat sebanyak 622 juta jiwa merupakan pasar terintegrasi nomor 3 terbesar di dunia, di mana lebih dari 50% populasinya berusia di bawah 30 tahun yang mewakili tenaga kerja aktif. (ASEAN, *A Blueprint for Growth, AEC 2015: Progress & Key Achievement*, 2015).

Berbagai kerjasama digalang oleh negara-negara anggota ASEAN,

sampai tiba momentum penting di tahun 2003 dalam pertemuan puncak ke-9 mereka di Bali, di mana seluruh pemimpin negara anggota mendeklarasikan kesepakatannya untuk membentuk *ASEAN Economic Community* (AEC) atau dalam bahasa Indonesia disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan pembentukannya adalah untuk menjadikan ASEAN sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, sosio ekonomi yang beragam namun semuanya meningkat secara tandem bersama-sama dalam sebuah komunitas sosio kultural dan politik yang aman. Sejak 2007 sebuah cetak biru (*blue print*) dari rencana induk MEA digodog sehingga akhirnya disepakati untuk dijalankan mulai tahun 2015. (Secretariat, 2015)

Cetak biru ini adalah target yang akan dicapai secara bersama sebagai sebuah komunitas kuat di Asia Tenggara. Cetak biru ini berisi 4 pilar utama (Ditjen KPI Kemendag, 2015) yaitu: 1) pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan ekonomi yang kompetitif; 3) pembangunan ekonomi yang merata; 4) integrasi dengan ekonomi global. Pilar-pilar itu akan secara bertahap dicapai guna mengarah ke tujuan akhir bahwa di tahun 2025, ASEAN akan: 1) memiliki ekonomi yang sangat kohesif dan terintegrasi; 2) menjadi komunitas yang kompetitif, inovatif, dan dinamis; 3) memiliki kerjasama sektoral yang sangat berkaitan, 4) komunitas yang berpusat pada manusia yang bersifat tangguh, inklusif dan berorientasi SDM; 5) komunitas yang global (ASEAN, AEC, 2015).

Upaya mencapai pilar pertama, yaitu mendirikan pasar tunggal dan basis produksi, dilakukan semua negara anggota ASEAN dengan

mengadakan berbagai kesepakatan yang dikenal dengan istilah *ASEAN Trade In Goods* yang mencakup kesepakatan: 1) bidang perdagangan barang; 2) bidang perdagangan jasa; 3) bidang investasi; 4) bidang ketentuan asal barang; 5) bidang prosedur kepabeanan; 6) bidang standard dan kesesuaian; 7) bidang fasilitas perjalanan di ASEAN; 8) perpindahan pelaku usaha, tenaga ahli, profesional, tenaga terampil, dan orang berbakat; 9) Peningkatan perdagangan dan penanaman modal; 10) statistik perdagangan dan penanaman modal intra ASEAN; 11) hak kekayaan intelektual; 12) penggunaan tenaga kerja kontrak dan industri pelengkap (AEC Center, 2015).

Penelitian ini mengarah kepada kesepakatan ke-8 yaitu perpindahan pelaku usaha, tenaga ahli, profesional, tenaga terampil dan orang berbakat dibidang transportasi laut. Kesepakatan ini merupakan upaya membuka batas negara untuk memungkinkan mobilitas ketenagakerjaan yang lebih supel dan mudah. Masing-masing negara anggota berkumpul dan berupaya untuk membuat kesepakatan bersama yang dikenal dengan nama MRA (*Mutual Recognition Arrangement*). MRA di sektor SDM diharapkan membuat perpindahan tenaga ahli, profesional, terampil, dan berbakat terfasilitasi dan teratur sehingga sektor pasar tunggal dan basis industri dapat ditunjang (ASEAN, A Blueprint for Growth, AEC 2015: Progress & Key Achievement, 2015).

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai salah satu profesi di dunia industri, sector transportasi laut secara langsung maupun tidak langsung terkait erat dengan MEA dan segala upaya menjadikan ASEAN sebuah kesatuan ekonomi yang besar

di dunia. Mengingat gaung MEA di tingkat pemerintah sudah bergema maka ada baiknya kita meninjau sejauh mana para pekerja di sector transportasi laut, mempersiapkan diri untuk masuk ke era MEA. Untuk itu dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pihak regulator sudah terlihat menjalankan aktivitas-aktivitas yang mencerminkan persiapan diri terhadap adanya mobilitas bebas tenaga kerja sector transportasi laut di wilayah ASEAN ?
2. Apakah para asosiasi kepelautan terlihat melakukan aktifitas yang mencerminkan persiapan diri mereka pada adanya mobilitas bebas tenaga kepelautan di wilayah ASEAN.

1.3. Teori

World Economic Forum (WEF) menemukan Indonesia di posisi ke-37 dalam *Global Competitiveness Index 2015-2016*. Indeks ini merupakan peringkat produktivitas negara dihitung dari keterkaitan antara institusi, kebijakan, dan faktor lainnya. Posisi Indonesia masih di bawah Singapura (posisi 2), Malaysia: 18 (posisi 18), dan Thailand: (posisi 32) (*World Economic Forum, 2016*). Salah satu pilar pengukuran terendah bagi Indonesia adalah *labour market efficiency* atau efisiensi pasar kerja. Ini menunjukkan bahwa permasalahan yang perlu diperbaiki di Indonesia masih banyak, termasuk kemampuan tenaga kerja.

Di Swiss ada sebuah lembaga bernama *Institute Management of Development* (IMD) yang menyusun peringkat 61 negara menurut situasi tenaga kerjanya. Indonesia, sebagai salah satu negara itu berada di posisi 41 dalam *World*

Talent Report 2015 yang tercatat turun 16 tingkat dari tahun sebelumnya. (IMD World Competitiveness Center team, Nov 2015). Laporan ini disusun berdasarkan 3 unsur yaitu 1) investasi dan perkembangan (*investment & development*); 2) menarik atau tidaknya situasi, kondisi maupun ketenagakerjaan suatu negara (*appeal*); serta 3) kesiapan fasilitas dan tenaga kerja (*readiness*).

Investasi pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta skema pengembangan tenaga kerja menempatkan Indonesia di peringkat 49 yakni baru berhasil mencapai 37,1%, dan berada di bawah Malaysia, Thailand, Singapura. Unsur *appeal* atau bagaimana menariknya negara Indonesia bagi pekerja asing ditinjau dari biaya hidup, kualitas hidup, motivasi pekerja, penggajian, dan perpajakan ternyata menempatkan Indonesia di peringkat 28 yakni baru mencapai 52,2%. Posisi ini masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sisi *readiness* yaitu kesiapan tenaga kerja dilihat dari keterampilan, pengalaman, kompetensi, ketersediaan, serta sistem pendidikannya, menempatkan Indonesia di peringkat 42 yakni hanya mencapai 40,6% di bawah Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa ketenagakerjaan Indonesia punya cukup banyak faktor yang menarik namun belum cukup berkembang dan belum siap. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tenaga kerja asing yang terampil akan tertarik dengan suasana bisnis di Indonesia, namun ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil dan yang memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni ternyata belum memadai.

Hal tersebut sejalan dengan analisis Pratiwi & Mahmudah yang mengatakan bahwa untuk menghadapi MEA, Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang siap bersaing agar MEA membawa dampak positif (Pratiwi & Mahmudah, 2013). Mereka menemukan bahwa tenaga kerja Indonesia banyak yang memiliki kecenderungan kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Selain itu juga memiliki rasa kurang percaya diri karena menganggap bahwa tenaga kerja asing lebih handal, lebih cerdas dan lebih kompeten. Jika ingin siap memasuki MEA, menurut para *analists* tersebut, kita perlu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, kondisi, kesehatan, dan penguasaan teknologi. Keterampilan tinggi akan meningkatkan daya saing dan pada akhirnya meningkatkan mobilitas tenaga kerja Indonesia sehingga kita tidak saja terkenal dengan penyedia tenaga kerja berketerampilan rendah (*low skill*).

ASEAN telah memulai membuka pertukaran jasa antar negara anggota sejak 1997 melalui AFAS (*ASEAN Framework in the Trade of Services*) dan bertujuan untuk mempromosikan efisiensi dan daya saing pemasok jasa (Aldaba, 2013). Negara anggota menginginkan agar ada kesepakatan terhadap pengakuan terhadap pendidikan, pengalaman, persyaratan, sertifikasi dan ijin yang berlaku di satu negara diberlakukan pula di negara lainnya. Konsep ini kemudian melahirkan MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) yang memungkinkan terjadinya mobilitas tenaga terampil di era MEA.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi

Penelitian dilakukan pengumpulan data sekunder di dua lokasi: kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II dan PT Tanjung Intan di Cilacap. Kantor Departemen Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.

B. Jenis Data

Metode dalam penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Peneliti mencari makna, pemahaman, dan pengertian tentang fenomena, kejadian dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh (Yusuf, 2014). Peneliti melihat fenomena tentang bagaimana pemerintah mempersiapkan perpindahan tenaga kerja sehubungan dengan MEA dan bagaimana asosiasi kepelautan merespons persiapan tersebut. Cara mendapat data terhadap fenomena persiapan itu adalah dengan dasar pemahaman kesiapan pemerintah.

Tujuan melakukan pendalaman ini adalah untuk mendapatkan *social empowerment* yakni kekuatan mengambil kesimpulan tentang fenomena sosial berupa persiapan memasuki era MEA bagi tenaga kerja sektor transportasi laut.

Objek dari penelitian ini adalah teks yang dipublikasikan secara elektronik oleh asosiasi kepelautan. Investigasi dilakukan sebatas pada aksesibilitas yang disediakan oleh asosiasi-asosiasi tersebut

Penelitian tidak menggunakan sampling karena populasinya yang tidak ekstensif, namun melakukan sensus. Sensus bersifat purposif pada asosiasi yang memiliki publikasi dengan aksesibilitas terbuka. Penelusuran menghasilkan kenyataan bahwa tidak semua asosiasi memiliki

keberadaan dengan aksesibilitas tinggi.

C. Analisis

Analisis dilakukan dengan cara deskriptif (Noor, 2012) yakni menelaah ketentuan mobilisasi tenaga kerja di tingkat ASEAN dari berbagai dokumentasi dan membaca kegiatan-kegiatan dari artikel-artikel yang dapat ditemui saat ini di ranah umum. Analisa dilakukan terhadap kegiatan yang bersifat sosial, organisasional, dan profesional. Kelompok data tersebut disilangreferensikan dan dituangkan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah ketenagakerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Seperti halnya yang dilansir *Republika*, pada 2017, Indonesia masih berada di peringkat ke-4 dalam hal pendidikan dan produktivitas yang dimiliki. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki posisi yang aman dalam hal ini. Mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di sini. Malah sebaliknya, tenaga kerja Indonesia lebih memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih layak.

Dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA. *ASEAN Economic Community* atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu:

1. MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis

produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara.

2. MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.
3. MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.

Dengan demikian, negara peserta ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apa pun. Banyak peluang yang bisa diambil dari MEA. Bersaing di pasar global membutuhkan setidaknya keterampilan dasar agar unggul di negeri sendiri, bahkan di luar. Untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi pasar global tersebut, maka perlu adanya keterampilan pokok yang harus dimiliki supaya bisa bersaing dengan negara-negara tetangga di era MEA.

1. Profesionalitas: Berkompeten dan Punya *Passion* pada Bidang yang Ditekuni

Dalam persaingan, seseorang harus bisa menjadi ahli di bidangnya. Untuk menjadi seorang ahli pada bidang tertentu, perlu konsistensi yang tinggi. Di dunia kerja seorang profesional biasanya dihargai lebih tinggi dan memiliki peluang kerja yang tinggi dengan *rate* upah yang tinggi juga.

2. Keterampilan Berbahasa Asing

Adalah Hal Mutlak

Karena akan bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang serta kultur yang berbeda-beda, tentu saja peran bahasa asing sangat penting. Sebagai alternatif yang paling mudah dalam berkomunikasi dengan beragam orang, kita bisa memilih bahasa Internasional yang cenderung dipakai banyak orang semisal bahasa Inggris. Tanpa adanya keterampilan bahasa asing, mustahil seseorang dapat bersaing dengan orang-orang dari negara lain apalagi dalam lingkup internasional. Selain keterampilan dasar di atas, untuk bisa sukses dalam persaingan di pasar bebas, Anda juga harus dibekali dengan tambahan *soft skill* berikut ini.

***Soft Skills* yang Menunjang Kesuksesan di Pasar Bebas MEA**

1. *Public Speaking*

Dalam dunia kerja, kita tidak bisa lepas dari yang namanya *public speaking*. Minimal *skill* ini akan diperlukan ketika mempresentasikan hasil karya, laporan, atau apa pun kepada atasan dan seluruh staff.

2. Kemampuan Negosiasi

MEA adalah pasar ekonomi di mana di dalamnya terdapat aktivitas perdagangan. Adalah kecil kemungkinannya seseorang bisa memenangkan persaingan tanpa adanya kemampuan negosiasi yang baik.

3. Kemampuan dalam Membangun *Relationship/Jaringan*

Dengan bekal ilmu pengetahuan, personalitas yang baik dan kemampuan komunikasi yang baik seseorang akan lebih mudah dalam membangun jaringan. Entah itu untuk urusan bisnis ataupun yang lainnya.

4. *Leadership*

Leadership adalah sifat kepemimpinan. Kepercayaan merupakan modal utama untuk menjadi seorang pemimpin.

5. **Kemampuan Interpersonal yang Baik**

Kemampuan interpersonal juga tidak boleh dilupakan kalau ingin menjadi orang yang berada dari segi moril maupun materiil.

6. **Penguasaan Informasi dan Teknologi**

Poin inilah yang mengemuka semenjak era globalisasi. Semua orang sekarang tidak bisa lepas dari teknologi, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Munculnya internet membuat perubahan drastis di dunia industri komersial. Hampir semua perusahaan di dunia memanfaatkan teknologi internet untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan. Nilai plus untuk pelajar pada era MEA ini adalah penguasaan teknologi dan informasi. Ini bisa dimulai dari mana saja semisal penguasaan program komputer atau *skill programmer*.

Sertifikasi

Sertifikasi kompetensi memegang peran yang penting dalam pergerakan lintas negara bagi tenaga kerja terampil. Tanpa adanya standard kompetensi yang diakui semua anggota negara MEA, maka pergerakan tenaga kerja tersebut tidak akan terjadi. Artikel dalam *Strategic Review* menuliskan bahwa pemahaman pelaku bisnis di 10 negara anggota ASEAN terhadap peran dan tujuan MEA di tahun 2014 masih rendah (30%), namun lebih rendah lagi pemahaman yang

dimiliki masyarakat umum (67%). Sebagian orang di Indonesia memiliki kekhawatiran bahwa negaranya hanya akan dijadikan pasar produk asing dan bahwa tenaga kerjanya hanya akan menduduki posisi *low skilled workers* (Swajaya, 2014).

Pebisnis Singapura juga khawatir bahwa para pendatang akan mengambil pekerjaan rakyat, dibayar lebih tinggi, menikmati kenyamanan yang diberikan pemerintah Singapura namun tidak memiliki kewajiban sebanyak penduduk asli Singapura. Mereka khawatir pemerintah akan lemah dalam pengawasan karena mayoritas pendatang ada di sektor swasta sehingga jauh dari pemerintah (Sugiyarto & Agunis, 2014). Di tingkat nasional, proses sertifikasi juga belum berjalan seperti yang direncanakan. Sumarna F. Abdurahman, ketua BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), mengatakan bahwa sampai 2014, Indonesia baru mensertifikasi 2,1 juta pekerja dari target 5 juta. Jumlah LSP di tahun 2014 juga baru mencapai 137 dari 250 lembaga yang ditargetkan. Di tahun 2015 ditargetkan 250 dan di tahun 2019 ditingkatkan menjadi 600 karena harus mampu mensertifikasi 10 juta pekerja (Retnaningrum, 2015).

Jika melihat ke dalam negeri, kondisi ketenagakerjaan sector transportasi laut di Indonesia bisa dikatakan tidak dalam kondisi yang baik. Berbagai permasalahan tenaga kerja, mulai dari upah, lamanya mengurus sertifikasi, hingga perlindungan tenaga kerja. Pembukaan banyak lapangan pekerjaan dan insentif berupa regulasi yang baik bagi perusahaan sangat penting untuk perkembangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaruh ketenagakerjaan dengan adanya MEA. Jika ditelaah, seharusnya MEA menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi tenaga kerja Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan karena kehadiran MEA akan membuka negara-negara lain di Asia Tenggara untuk menerima tenaga kerja dari

Indonesia. Bagi pengusaha, MEA bisa menjadi jalan bagi mereka untuk bisa merekrut tenaga kerja berkualitas untuk lebih meningkatkan *value* dari perusahaan mereka. Tentunya diharapkan kualitas *output*-nya menjadi meningkat.

Hanya saja, perlu digarisbawahi bahwa MEA bisa memunculkan risiko yang berdampak pada ketenagakerjaan di Indonesia. Persaingan tenaga kerja menjadi poin yang wajib diwaspadai. Para perekrut tenaga kerja tentunya menginginkan orang-orang profesional yang ahli dalam bidangnya. Sayangnya, dilihat dari segi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah dengan tenaga kerja dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi

kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia dengan mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. 10 Oktober 2014. *Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi, Pekerja Indonesia Bakal Tersingkir*. dari <http://bksp-jateng.org>: <http://bksp-jateng.org/tidak-memiliki-sertifikat-kompetensi-pekerja-indonesia-bakal->

ASEAN, S. 2015. *AEC*. dari www.asean.org:

[tersingkir.html](http://www.asean.org/tersingkir.html). (diakses pada 30 Juni 2016)

Aldaba, R. M. 2013. ASEAN Economic Community 2015: Labor Mobility and Mutual Recognition Arrangements on Professional Services. *Philippines Institute of Development Studies*, hal. DISCUSSION PAPER SERIES NO. 2013-04.

<http://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/05/56-December-2015-Fact-Sheet-on->

ASEAN- Economic-Community-AEC-1.pdf. (diakses pada 30 Juni 2016)

Direktorat Pembinaan Kursus & Pelatihan. 2016. *Informasi Organisasi dan Asosiasi Profesi*. Diambil kembali dari

<http://www.infokursus.net/ormit/ormitdetil.php?id=28>.

Ditjen KPI Kemendag. 15 September 2015. *MEA 2015*. Diambil kembali dari <http://isd-indonesia.org/wp-content/uploads/2015/09/Indonesia-Services-Dialogue-Meningkatkan-Daya-Saing-Meraih-Peluang.pdf>

Noor, J. 2012. *Metodologi Penelitian*. Prenada Media Group. Jakarta.

Pratiwi, E. N., & Mahmudah, R. A. 2013. *Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja dalam Menghadapi MEA 2015*. *Economics Development Analysis Journal* , 2- 7.

Retnaningrum, D. A. 27 Maret 2015. BNSP Akui Belum Capai Target Sertifikasi Pekerja. *Satu Harapan.com* .

World Economic Forum. 2016. *The Global Competitiveness Report 2015- 2016*. Geneva: report.weforum.org.

Yusuf, M. A. 2014. *Metode Penelitian*. Prenada Media Group

